

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Risiko inflasi ke depan masih dibayangi oleh volatilitas harga pangan akibat cuaca, fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok, dan biaya transportasi. Untuk menekan risiko tersebut, pemerintah daerah setempat terus mengintensifkan [Gerakan Pangan Murah \(GPM\)](#) guna menjaga stabilitas suplai dan keterjangkauan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di daerah meliputi keterbatasan pasokan dan gejolak harga pangan (seperti cabai merah, daging ayam ras, dan beras), rantai distribusi yang tidak efisien yang menyebabkan disparitas harga antar wilayah, serta gangguan cuaca ekstrem yang merusak hasil panen.

Tantangan ini juga diperburuk oleh masalah struktural di tingkat lokal:

- **Infrastruktur dan Distribusi:** Akses jalan yang kurang memadai serta sarana transportasi yang terbatas meningkatkan biaya logistik.
- **kurangnya ketersediaan pasokan**
- **kelancaran distribusi**
- **faktor cuaca ekstrim**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Diterbitkannya surat keputusan bupati pinrang tentang pembentukN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pemerintah Daerah (Pemda) secara rutin melakukan pemantauan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok. Berdasarkan arahan strategis Kementerian Dalam Negeri, implementasi di lapangan difokuskan pada beberapa pilar utama:

- **Pemantauan Harga dan Stok:** Melakukan pengecekan langsung ke pasar secara berkala dan mengaktifkan Satgas Pangan daerah untuk memitigasi spekulasi harga.
- **Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah:** Menggelar pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan harga komoditas utama (seperti beras, cabai, dan bawang).
- **Gerakan Menanam:** Mendorong masyarakat dan instansi untuk menanam komoditas penyumbang inflasi tinggi (seperti cabai) di pekarangan rumah guna memenuhi kebutuhan mandiri.
- **Kerja Sama Antardaerah (KAD):** Menjalin kemitraan dengan daerah surplus penghasil pangan untuk menjaga pasokan tetap stabil.
- **Pelaporan dan Evaluasi Rutin:** Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi perkembangan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah daerah melakukan langkah konkret pengendalian inflasi, yaitu: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antardaerah, gerakan menanam pangan, dan dukungan transportasi .

Pemantauan di lapangan diwujudkan melalui pelaksanaan pasar murah dan pengecekan stok secara berkala di berbagai wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Pinrang dan sekitarnya, berikut adalah beberapa poin teknis operasional dan data tren yang bisa dieksplorasi

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah berfokus pada kerangka **4K** (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) . Pemerintah daerah mengimplementasikan strategi ini melalui optimalisasi APBD untuk intervensi pasar dan memperkuat sinergi lintas sektoral.

Berikut adalah bentuk implementasi kebijakan utama yang direkomendasikan dan dijalankan di berbagai daerah:

- **Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM):** Melaksanakan intervensi harga secara langsung dengan subsidi dari APBD untuk komoditas penyumbang inflasi utama seperti beras, cabai, dan bawang merah
- **Kerja Sama Antar Daerah (KAD):** Menjalinkan kesepakatan dagang langsung antara wilayah defisit pangan dengan daerah surplus/penghasil untuk menjaga kestabilan ketersediaan stok.
- **Penguatan TPID:** Mengaktifkan peran [Tim Pengendalian Inflasi Daerah \(TPID\)](#) untuk rutin memantau harga di pasar dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor demi mencegah penimbunan barang
- Komunikasi efektif